



**ANALISIS BIAYA CADANGAN RISIKO PINJAMAN DAN CADANGAN
 RISIKO PINJAMAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN UNIT
 PENGELOLA KEUANGAN
 (STUDI KASUS: BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DI
 KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY)**

Kurniawan*
Dody Hapsoro

Program Studi Akuntansi
 STIE YKPN

*email: kurniawan.afandi1991@gmail.com

ABSTRACT

This study examines whether there are differences in the cost of the loan risk reserves and the loan risk reserves between audit results data and financial reporting. The research sample consisted of the audit results report on 50 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) in Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta which have been audited by Budiman, Wawan, Pamudji and Partners Public Accounting Firm in 2014.

This study found that the cost of the loan risk allowances and loan risk allowances between audit result and reporting differed significantly. The study concluded that almost all of BKM not charge cost and reserve risk of the loan according collectibility list that is used as the source of the audit results calculation.

INFO ARTIKEL

Diterima: 10 Oktober 2016
 Direview: 18 Oktober 2016
 Disetujui: 5 Desember 2016
 Terbit: 7 Desember 2016

Keyword:

Cost of the loan risk reserves, loan risk reserves, audit results, reporting.

PENDAHULUAN

Sebagai usaha dalam menanggulangi kemiskinan di daerah perkotaan, pemerintah mencanangkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Sebagai upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dan meningkatkan keefektifan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007. Penerimaan bantuan tersebut dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dengan kinerja ekonomi yang baik, BKM diharapkan memperoleh opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) dari pihak auditor independen sebagai syarat untuk mendapatkan pemupukan modal dari pemerintah untuk tahun berikutnya. BKM dituntut dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat miskin untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam kondisi perekonomian yang labil maupun stabil, setiap perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang handal untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kondisi keuangan tersebut dapat dilihat dari informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta laporan keuangan pendukung lainnya.

Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh BKM harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. BKM dikategorikan dalam UKM yang merupakan organisasi masyarakat atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik karena tidak memberikan laporannya ke bursa efek dan menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal (Martani, 2011). Hal tersebut merupakan ciri entitas yang dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan SAK ETAP. SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu Januari 2010. Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit serta mendapatkan opini audit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk memperoleh dana untuk pengembangan usahanya.

Dalam praktik yang dilakukan di lapangan, gugus tugas BKM yang bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK merupakan lembaga masyarakat gugus tugas dari BKM yang dikelola atas dasar prinsip profesionalisme serta berdasarkan pedoman pengelolaan dana bergulir. UPK mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana bergulir BKM. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi keuangan, BKM diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang disajikan dalam satuan rupiah, disajikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Proyek P2KP dan tidak terlepas dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Konsep yang digunakan adalah konsep harga historis, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta prinsip dan praktik yang berlaku di Indonesia.

Saat penulis melakukan kerja praktik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan untuk mengaudit laporan keuangan BKM khususnya laporan yang dibuat UPK, penulis menemukan bahwa terdapat banyak UPK BKM yang mencadangkan risiko pinjaman tidak sesuai

dengan saldo yang ada dalam daftar kolektibilitas pinjaman dengan persentase cadangan berdasarkan kelompok umur piutang yang telah ditetapkan berdasarkan buku petunjuk teknis pinjaman bergulir. Pencadangan risiko pinjaman pada laporan posisi keuangan yang tidak sesuai berakibat pada tidak sesuainya pembebanan biaya cadangan risiko pinjaman yang ada pada laporan laba rugi UPK.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”

Menurut Sugiri dan Riyono (2008: 1), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sementara itu, menurut Jusup (2011: 4), akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dari pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi dari kegiatan jasa pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembukuan UPK, akun/buku besar Pinjaman KSM digunakan untuk mencatat transaksi pencairan pinjaman ke KSM, mencatat penerimaan angsuran pinjaman dari KSM, dan mencatat saldo Pinjaman KSM sama halnya dengan piutang. Menurut Jusup (2014: 71), piutang timbul apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain. Piutang merupakan tagihan penjual

kepada pembeli sebesar nilai transaksi penjualan. Piutang dapat juga timbul apabila perusahaan memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembukuan UPK, akun biaya cadangan risiko pinjaman digunakan untuk mencatat biaya atas pencadangan dana untuk menanggulangi risiko pinjaman Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selama tahun berjalan. Menurut Hery (2011: 45), besarnya estimasi atas beban piutang yang tak tertagih akan diakui (dicatat) dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat, tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Besarnya estimasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman masa lampau mengenai jumlah piutang usaha yang macet. Nilai biaya cadangan risiko pinjaman adalah sebesar penyesuaian cadangan risiko pinjaman tahun yang diaudit dibandingkan dengan cadangan risiko pinjaman tahun sebelumnya jika jumlah cadangan tahun ini lebih besar daripada cadangan tahun sebelumnya. Jika jumlah cadangan yang dibentuk tahun ini lebih kecil dibandingkan cadangan tahun sebelumnya, maka UPK tidak perlu untuk membebankan biaya cadangan risiko pinjaman tahun ini.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembukuan UPK, cadangan risiko pinjaman digunakan untuk mencatat cadangan yang dibentuk di sisi kredit dan cadangan yang digunakan di sisi debit yang sifatnya pembukuan non cash (non tunai) sama halnya dengan cadangan kerugian piutang. Menurut Sumarsan (2013: 30), penyisihan penghapusan piutang berdasarkan metode cadangan (allowance method) ditentukan dengan persentase berdasarkan kelompok umur piutang. Umur piutang adalah lamanya piutang yang belum dilunasi oleh pelanggan. Oleh karena itu, selama umur piutang tersebut belum dilunasi maka semakin tinggi persentase tak tertagih atas piutang dagang tersebut. Kebijakan cadangan risiko pinjaman didasarkan pada ketentuan umum pengelolaan pinjaman untuk BPR yang dikeluarkan BI No.13/26/PBI/2011.

Berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Audit Independen LKM, auditor diharapkan memberikan

keyakinan secara independen atas akuntabilitas penggunaan dana oleh BKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) beserta UPK dan pihak-pihak pelaksana kegiatan atau KSM. Menurut Jusup (2014: 10), pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan laporan keuangan sebagai keseluruhan, yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa dinyatakan dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Tanggungjawab utama auditor independen atau akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan entitas dan mengomunikasikan laporan auditor kepada pihak yang bertanggung jawab menyalurkan dana (prinsipal) kepada BKM selaku agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Menurut Sunarto (2009), dalam teori keagenan manajemen menyajikan laporan keuangan dimotivasi oleh perilaku oportunistik. Motivasi tersebut mendorong manajemen melakukan manajemen laba (earnings management). Manajemen cenderung menyajikan laba lebih tinggi daripada yang sesungguhnya karena berhubungan dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajemen.

Pengembangan Hipotesis

Pada saat ikut melakukan pemeriksaan di beberapa BKM di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menemukan beberapa kejanggalan pada pencadangan risiko pinjaman realisasi laporan posisi keuangan di UPK yang sering tidak sesuai dengan saldo dalam daftar kolektibilitas yang telah dibuat berdasarkan pada ketentuan umum pengelolaan pinjaman untuk BPR yang dikeluarkan oleh BI No. 13/26/PBI/2011 dalam

petunjuk teknis pinjaman bergulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum. Besarnya nilai cadangan risiko pinjaman terhadap saldo total pinjaman KSM menggambarkan kurang cermatnya UPK dalam memberikan persetujuan kredit pinjaman kepada KSM. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan UPK yang kurang sehat karena banyak pinjaman yang bermasalah bahkan dikategorikan macet. Besarnya selisih cadangan risiko pinjaman tahun yang bersangkutan terhadap saldo akhir tahun sebelumnya berakibat pada terlalu besarnya biaya cadangan risiko pinjaman yang harus dibebankan dalam laporan laba rugi UPK. Oleh karena itu pada praktik yang dilakukan, banyak UPK mencadangkan risiko pinjaman lebih kecil dibandingkan saldo yang tertera pada daftar kolektibilitasnya untuk tujuan manajemen laba (*earnings management*). Motivasi oportunistik mendorong UPK untuk menyajikan laba lebih tinggi daripada yang sesungguhnya karena kompensasi yang akan diterima berupa perguliran dana untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan antara biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit dan biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan pada BKM di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- H2: Terdapat perbedaan antara cadangan risiko pinjaman hasil audit dan cadangan risiko pinjaman pelaporan pada BKM di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menggambarkan secara jelas inti permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder

merupakan data yang dipublikasikan oleh pihak lain. Data yang diteliti meliputi 50 Laporan Hasil Audit BKM di Kabupaten Bantul Tahun 2014 yang telah diaudit oleh KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.

Teknik Sampel dan Fokus Analisis Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah sampel populasi yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada dua akun laporan keuangan, yaitu biaya cadangan risiko pinjaman dan cadangan risiko pinjaman pada setiap BKM di Kabupaten Bantul. Masing-masing akun tersebut memiliki kategori pengukuran yang berbeda, yaitu berdasarkan hasil audit dan pelaporan. Data Biaya Cadangan Risiko Pinjaman hasil audit berasal dari nilai penyesuaian saldo cadangan risiko pinjaman hasil audit dibandingkan saldo cadangan risiko pinjaman tahun lalu jika cadangan risiko pinjaman tahun ini lebih besar daripada saldo dalam laporan auditor tahun sebelumnya. Jika cadangan risiko yang dibentuk lebih kecil daripada cadangan risiko pinjaman tahun sebelumnya, maka UPK tidak perlu membebankan biaya cadangan risiko pinjaman pada laporan laba rugi. Data Biaya Cadangan Risiko Pinjaman pelaporan berasal dari saldo yang tertera dalam laporan laba rugi BKM. Data Cadangan Risiko Pinjaman hasil audit berasal dari saldo yang tertera dalam daftar kolektibilitas pinjaman. Data Cadangan Risiko Pinjaman pelaporan berasal dari saldo yang tertera dalam laporan posisi keuangan.

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pengujian statistik parametrik dan uji beda dua populasi Paired Sampel T Test (sampel berpasangan). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit dengan biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan serta cadangan risiko pinjaman hasil audit dengan cadangan risiko pinjaman pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini menguji perbedaan antara biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit dengan cadangan risiko pinjaman pelaporan dan cadangan risiko pinjaman hasil audit dengan cadangan risiko pinjaman pelaporan.

Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit jauh lebih besar dibandingkan rata-rata biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan. Rata-rata biaya cadangan risiko pinjaman juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hasil audit dan pelaporan.

**Tabel 1
Data Hasil Audit
Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit	50	0	225477798	27788761,20
Cadangan risiko pinjaman hasil audit	50	0	236790327	35405116,49

**Tabel 2
Data Pelaporan
Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan	50	0	12000000	1821733,81
Cadangan risiko pinjaman pelaporan	50	3375	88564905	9667001,53

Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan nilai signifikansi yang digunakan (α) = 5%, tidak ada data yang berdistribusi normal pada Tabel 3. Oleh karena asumsi normalitas dibutuhkan untuk pengujian statistik parametrik, maka perlu dilakukan transformasi data dengan transformasi akar kuadrat. Transformasi akar kuadrat dilakukan bila data tidak memenuhi

kehomogenan ragam (Hidayat: 2013). Transformasi akar kuadrat dilakukan karena ada sebaran data yang memiliki nilai nol (0) dan dirumuskan dalam fungsi = $\text{SQRT}(\text{Data Asli} + 0,5)$ dalam aplikasi statistik. Setelah dilakukan transformasi hasil uji menunjukkan semua data berdistribusi normal pada Tabel 4.

Tabel 3
Data Asli
Kolmogorov-Smirnov

	Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit	Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan	Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit	Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan
N	50	50	50	50
Asymp. Sig. (2-tailed)	,002	,010	0,001	0,008

Tabel 4
Data Transfromasi
Kolmogorov-Smirnov

	Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit	Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan	Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit	Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan
N	50	50	50	50
Asymp. Sig. (2-tailed)	,356	,565	,696	,088

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Perbedaan tentang Biaya Cadangan Risiko
Pinjaman

Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara biaya cadangan risiko

pinjaman hasil audit dan biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan pada BKM di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5
Perbedaan Biaya Cadangan Risiko Pinjaman

		t	df	Sig (2-tailed)
Pair 1	Biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit - Biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan	6,177	49	0,000

Hasil uji statistik menunjukkan nilai derajat kebebasan (degree of freedom) d.f. = 50 - 1 = 49. Hasil uji menunjukkan nilai t statistik sebesar 6,177 lebih besar daripada t tabel 5% = 2,00958. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan cadangan risiko pinjaman ini adalah signifikan secara statistik. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi Sig (2-tailed) = 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi (α) yang digunakan = 0,05, dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan signifikan antara biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit dan biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar BKM belum membebaskan biaya cadangan risiko pinjaman sesuai dengan hasil audit yang berasal dari nilai penyesuaian cadangan risiko pinjaman berdasarkan hasil audit tahun 2014 dibandingkan saldo cadangan risiko pinjaman laporan auditor tahun 2013 jika cadangan yang dibentuk tahun ini lebih besar daripada tahun

sebelumnya. Jika cadangan yang dibentuk tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, maka UPK tidak perlu membebankan biaya cadangan risiko pinjaman pada laporan laba rugi.

Perbedaan tentang Cadangan Risiko Pinjaman

Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara cadangan risiko pinjaman hasil audit dan cadangan risiko pinjaman pelaporan pada BKM di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 6
Perbedaan tentang Biaya Cadangan Risiko Pinjaman

		t	df	Sig (2-tailed)
Pair 1	Cadangan risiko pinjaman hasil audit - Cadangan risiko pinjaman pelaporan	5,534	49	0,000

Hasil uji statistik menunjukkan nilai derajat kebebasan (degree of freedom) d.f. = 50 - 1 = 49. Hasil uji menunjukkan nilai t statistik sebesar 5,534 lebih besar dari t tabel 5% = 2,00958. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan cadangan risiko pinjaman ini adalah signifikan secara statistik. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi Sig (2-tailed) = 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi (α) yang digunakan = 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara cadangan risiko pinjaman hasil audit dan cadangan risiko pinjaman pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar BKM belum mencadangkan risiko pinjaman sesuai dengan daftar kolektibilitasnya berdasarkan ketentuan umum pengelolaan pinjaman untuk BPR yang dikeluarkan BI No.13/26/PBI/2011 dalam petunjuk teknis pinjaman bergulir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum-Direktorat Jendral Cipta Karya.

KESIMPULAN

Sebagian besar UPK BKM belum mencadangkan risiko pinjaman dan membebankan biaya cadangan risiko pinjaman sesuai hasil audit berdasarkan peraturan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Banyak UPK yang menganggap bahwa biaya cadangan risiko pinjaman yang didasarkan pada kenaikan nilai cadangan risiko pinjaman terhadap cadangan risiko pinjaman tahun sebelumnya tidak berdampak langsung pada kondisi keuangan

BKM karena sifat pembukuan yang non cash (non tunai). Oleh karena sifat pembukuan tersebut, UPK enggan mencadangkan risiko pinjaman sesuai daftar kolektibilitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan hasil audit. Kekhawatiran akan penyajian laba di laporan laba rugi yang semakin kecil, membuat UPK tidak mencadangkan risiko pinjaman secara penuh sesuai daftar kolektibilitas dalam laporan posisi keuangan. Bagi petugas UPK selaku pengelola dan pembuat laporan keuangan BKM menganggap bahwa tolok ukur utama kinerja UPK BKM diukur berdasarkan laba yang diperoleh dalam satu periode akuntansi, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Manajemen laba yang dilakukan UPK atas dasar motivasi oportunistik mengakibatkan berkurangnya kualitas penyajian informasi keuangan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan, yaitu:

1. Periode waktu sumber data yang digunakan hanya satu tahun, yaitu laporan hasil audit tahun 2014.
2. Jumlah sampel yang terbatas untuk laporan hasil audit yang dimiliki oleh KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.
3. Fokus pembahasan hanya pada akun cadangan risiko pinjaman dan akun biaya cadangan risiko pinjaman karena kegiatan utama BKM dalam memberikan pinjaman kepada KSM berpengaruh langsung terhadap kedua akun ini.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Periode waktu sumber data perlu diperpanjang dengan menggunakan data beberapa tahun agar dapat diolah untuk memperoleh informasi trend data.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar, yaitu seluruh kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta agar diperoleh gambaran yang jelas untuk masing-masing kabupaten.
3. Fokus pembahasan perlu ditambah dengan rasio keuangan atau akun lainnya yang masih berhubungan dengan aktivitas utama BKM dalam memberikan pinjaman.

REFERENSI

- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Gubernur Bank Indonesia. Jakarta.
- Hery. 2011. *Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, Anwar. 2013. Transformasi Data. <http://www.statistikian.com>. diakses pada tanggal 18 Agustus 2016.
- Hidayat, Anwar. 2013. Uji *t Paired* dengan SPSS. <http://www.statistikian.com>. diakses pada tanggal 18 Agustus 2016.
- Jensen, M. C. and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. <http://papers.ssrn.com>. diakses pada tanggal 1 September 2016.
- Jusup, Al. Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi 7. Jilid 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Jusup, Al. Haryono. 2014. Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Edisi 7. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Martani, Dwi. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Materi ini dipresentasikan pada kegiatan Konferensi Regional Akuntansi III, Riau, 15 Maret.
- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Audit Independen LKM. Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum.
- Petunjuk Teknis Pembukuan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum.
- Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir, Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum.
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2008. Akuntansi Pengantar 1. Edisi 7. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sumarsan, Thomas. 2013. Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS. Jakarta: PT Indeks.
- Sunarto. 2009. Teori Keagenan dan Manajemen Laba. *Kajian Akuntansi*. Hal. 13 – 28, Vol. 1 No. 1. ISSN: 1979-4886. <http://www.unisbank.ac.id>. diakses pada tanggal 2 September 2016.